

PDIP Diyakini Masih Kuat di Pilgub

SEMARANG - Meskipun mulai muncul nama-nama tokoh nasional yang diincar partai politik (parpol) di Jateng dalam Pilgub, namun diyakini PDI Perjuangan masih mempunyai kekuatan lebih. Terlebih lagi, belakangan juga muncul fenomena banyaknya kader internal PDIP khususnya para bupati yang mendaftar, menunjukkan kompetensi partai tersebut masih kuat.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip, M Yulianto menganggap ada lima alasan bagi para petahana dan *incumbent* bupati meminati posisi sebagai gubernur Jateng.

Bersambung ke hal 7 kol 1



M Yulianto
Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip

”

*Ini menjadi bagian dari partisipasi *policy* yang dibuka oleh Megawati. Sekaligus untuk konsolidasi politik partai.*

PDIP (Sambungan hlm 1)

Yulianto menjelaskan, alasan pertama mengapa banyak petahana dan *incumbent* mendaftar yakni, PDIP diyakini masih menjadi partai yang paling kuat. Banyak kader yang beradu nasib dengan melihat peluang keberuntungan.

“Alasan kedua adalah membangun karir politik terutama yang sudah dua kali menjabat jadi bupati di daerah,” jelas Yulianto saat dihubungi *Wawasan*, Jumat (4/8).

Alasan lain, adalah keberanian dari kader PDIP itu sendiri. Hal itu menjadi dinamika baru dalam persaingan di internal PDI Perjuangan dalam mendapatkan rekomendasi partai. “Ini menjadi bagian dari partisipasi *policy* yang dibuka oleh Megawati. Sekaligus untuk konsolidasi politik partai,” tambahnya.

Pasalnya, dalam prinsip di PDIP, siapa yang ditentukan mendapatkan rekomendasi harus digotong dan didukung bersama untuk memenangkan

paslon tersebut.

Alasan lain, lanjutnya, sebagai investasi politik bagi cagub dan cawagub yang mendaftar melalui PDIP sebagai persiapan dalam pertarungan Pemilu 2019. “Ya misal jadi caleg dan Pilkada di kesempatan lain. Karena PDIP lebih dinamis,” terangnya.

Yulianto melihat, hingga kini belum ada tokoh nasional yang turun seperti di partai lain. Hal itu sebagai bentuk partai mendengarkan aspirasi dari daerah.

“Tokoh nasional PDIP sudah menghitung arah tren kebijakan Megawati, meksi kendali di DPP namun aspirasi daerah tetap didengar. Sehingga (tokoh pusat) tidak berani mengajukan diri sebagai gubernur,” tambahnya.

Hal yang perlu dicatat, kader atau pun tokoh masyarakat yang akan diusung adalah mereka yang bisa diterima masyarakat. Salah satunya dilihat dari survey politik, siapa yang paling diterima masyarakat, maka akan diusung. ■ **M9-yan**